BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalm kegotong royongan nasional, merupakan wujud nyata peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Berpedoman pada ketentuan-ketentuan perpajakan yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 dan yang menjadi landasan utama pemungutan pajak diterapkan dalam UU yaitu UU No 12 Th 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengarahan pajak sehubungan dengan perolehan hak atas bumi atau perolehan manfaat atas bangunan .

Pada hakekatnya pembayaran PBB merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong royongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam penerapannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan serta ditunjang oleh suatu sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang dihasilkan dari iuran rakyat untuk membiayai kegiatan negara. Di dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan pajak maka pemerintah memberikan wewenang kepada daerah masing-masing khususnya untuk peningkatan yang nantinya dipergunakan untuk pembangunan daerah dan melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya sendiri.

Peranan pajak bagi negar sangatlah berat, sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang ditujukan untuk biaya dalam pembangunan berbagai sarana prasarana yang kegunaannya bukan secara individual, tetapi ditujukan kepada kepentingan umum yaitu masyarakat.

Berhasilnya suatu daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan tolak ukur bagi daerah tersebut atas kemampuannya " Mengisi Otonomi Yang Nyata dan Bertanggung Jawab ".

Sebagai konsekwensi dari hal tersebut diatas maka terhadap daerah-daerah diberikan sumber pembiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No 5 tahun 1974 tentang "Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah".

Sehubungan dengan hal itu Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kotamadya DT II Bandung, dihadapkan pada suatu tantangan sejauh mana usaha yang didapat dilakukan untuk mengisi otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya dalam usaha pengumpulan dana untuk membiayai pembangunan.

Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber pajak untuk daerah kotamadya yang bergerak dalam bidang jasa umum. Menetapkan dan menghitung besarnya wajib pajak dan wajib retribusi (WR) serta pendapatan penghasilan yang cukup besar dari PBB. Dinas Pendapatan Daerah menetapkan kebijaksanaan dibidang penetapan pajak yang merupakan keharusan bagi wajib pajak didalam menghitung sendiri yang benar yang harus dipegang dalam sistem (Self Assesment System),sistem ini merupakan suatu sistem yang menganut kebijakan bahwa didalam pemungutan pajak, sistem ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan wajib pajak aktif, pelaksanaannya dilakukan mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan baik dan benar serta tidak melampaui batas tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Didalam pelaksanaan perhitungan pajak terhadap PBB tersebut kemungkinan akan terjadi kekeliruan dan keterlambatan terhadap kemungkinan penyetoran, kemungkinan ini akan sangat merugikan bagi Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu instansi yang dipercaya oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka kepada wajib pajak diberikan sangsi administrasi bagi setiap keterlambatan penyetoran yang telah melampaui jatuh tempo pembayaran pajak.

Bila pelaksanaan penyetoran dilaksanakan secara efektif maka akan sangat mendukung pengelolaan kas sehigga membantu dalam

peningkatan pendapatan daerah bagi Dinas Pendapatan Daerah. Berpedoman pada uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan-permasalahan tersebut. Dimana penulis berupaya untuk ikut memberi solusi yang terbaik untuk mengatasi setiap kendala serta berusaha untuk ikut memberikan konstribusi terhadap permasalahan pada PBB dengan tema untuk itu penulis memilih jjudul penelitian sebagai berikut :

" PERANAN PENGELOLAAN DAN SISTEM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH TK II BANDUNG ".

Tugas akhir ini penulis harapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan teknis di dunia usaha/industri/institusi pemerin-tah yang diaplikasikan, dengan membandingkan terhadap teori-teori yang telah dipelajari selama masa setudi berlangsung.

Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dengan mengerjakan Tugas Akhir antara lain:

1 Untuk menigkatkan dan mengembangkan kemampuan analisis terhadap masalah-masalah luar kampus dan untuk menambah wawasan yang dimiliki penulis dengan berpedoman pada bakat serta kesungguhan dalam mengerjakan tugas-tugas yang tentunya dapat dijadikan bekal bila saatnya terjun kelapangan .

2 Agar mahasiswa memperoleh pengalaman yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga tidaklah terlalu sulit untuk menyesuaikan diri pada lingkungan kerja terutama dalam penerapan kedisiplinan kerja, pembagian tugas dan wewenang serta tangung jawab.

Melalui pelaksanaan tugas akhir ini diharapkan pula untuk menghasilkan lulusan-lulusan IGI yang cakap, terampil dan siap pakai.

1.2 Maksud dan Tujuan

Setelah melakukan penelitian dan peninjauan lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan dan mengetahui gambaran singkat mengenai dunia kerja yang akan ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan serta mendahulukan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan ke dalam aplikasi dunia kerja dalam suatu perusahaan.

Adapun tujuan pembuatan Tugas Akhir ini sendiri adalah ;

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan laporan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah baik ekstern maupun Intern.
2. Dapat melakukan analisis terhadap setiap laporan perpajakan pada kantor pelayanan PBB Bandung Satu.
3. Untuk memperoleh gambaran langsung dan pengalaman praktis bagi penulis mengenai dunia kerja .
4. Dapat membandingkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari pekuliahan dengan kenyataan yang terdapat di lapangan.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam upaya untuk

menyelesaikan pendidikan program study Diploma III Ahli Keuangan Perbankan di IGI.

1.3 Metodologi Penelitian

Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang telah disebut diatas, maka penulis menggunakan metode Deskriptif, metode ini yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan setiap data yang diperlukan untuk kemudian dianalisa dan disimpulkan.

Data-data penelitian penulis peroleh dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis Mengamati cara kerja serta melakukan pengamatan terhadap pelaporan perpajakan pada kantor pelayanan PBB Bandung Satu.

2. Wawancara

Wawancara dengan pimpinan serta staf yang terkait langsung dengan proses perpajakan dan mencatat setiap keterangan atau informasi yang diberikan oleh pegawai pada kantor perpajakan.

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan staf atau pimpinan pada kantor pajak,mengenai hal-hal yang kurang dimengerti oleh penulis.

3. Studi Perpustakaan.

Studi perpustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan setiapdata atau teori, kemudian penulis mempelajari dan untuk kemudian untuk dibahas berdasarkan studi literatur yang memiliki keterkaitan langsung

dengan topik utama permasalahan yang akan dianalisis.

1.4 Pembatasan Masalah

Setiap Masalah pada hakekatnya sangat kompeks, maka untuk menghindari agar masalah yang menjadi objek penelitian tidak menyimpang dan dapat menjelaskan objek penelitian ini maka penulis perlu membatasinya .Masalah yang diteliti penulis akan difokuskan pada " Peranan Pengelolaan dan Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan DT II Bandung."

Sedangkan pembatasan masalah terhadap pemungutan pajak, penulis membahas masalah penagihan pajak, sistem pemungutan/penagihan pajak, syarat-syarat pemungutan pajak, dan kewajiban pajak yang semuanya ini dapat disajikan sebagai berikut :

- Bagaimana tatacara pembayaran PBB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya DT II Bandung
- Bagaimana cara pelaksanan pengelolaan PBB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya DT II Bandung.
- Bagaimana cara mengatasi apabila ada kekeliruan dan keterlambatan didalam pelaksanaan penghitungan dan penyetoran PBB.

1.5 Sistem Penulisan

Setiap data yang diperoleh penulis, melalui penelitian yang dilakukan berpedoman pada landasa teoritis dan wawancara-wawancara

langsung dilapangan sehingga diharapkan dari kedua sumber ini dapat disusun sebuah laporan yang sistematik dalam bentuk laporan tertulis yang meliputi dari lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Maksud dan Tujuan, Metodologi Penelitian , Pembatasan Masalah, serta Sistem Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi konsep-konsep dan analisis yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan landasan teori yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan dihadapi.

BAB III Data Hasil Penelitian

Melakukan analisa tentang data hasil penelitian berdasarkan semua informasi yang ada di Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu yang berhubungan dengan masalah yang diambil.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian

Bab ini akan menguraikan tentang analisis permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan landasan teori dan berdasarkan fakta-fakta dari setiap kegiatan intansi tersebut, kemudian dari analisa masalah tersebut diupayakan dapat diperoleh suatu alternatif pemecahan masalah . Agar analisa penelitian mendalam dan dapat memberikan konstribusi yang positif, maka dalam

analisis ikut juga dilakukan perancangan sistem , dalam hal ini penulis menggunakan sistem komputer untuk mengaplikasikan kedalam bagan-bagan serta penggunaan software yang penulis kuasai.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Mengemukakan suatu kesimpulan terhadap alternatif permasalahan yang ada serta ikut serta memberikam saran bagi perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan serta mengupayakan agar sistem pengelolaan dapat menjadi efektif.